



Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Konektivitas Ekonomi Daerah di Nusa Tenggara Barat

Nur Aisyah

Program Studi Manajemen, Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: nur.aisyah@usu.ac.id

Article History

Manuscript submitted:

02 October 2025

Manuscript revised:

21 October 2025

Accepted for publication:

30 October 2025

Keywords

infrastructure development,
economic connectivity,
regional growth, logistics,
nusa tenggara barat

Abstract

Infrastructure development plays a vital role in strengthening regional economic connectivity, particularly in areas with limited accessibility such as Nusa Tenggara Barat (NTB). This study aims to analyze the impact of infrastructure development on economic connectivity and local growth. Using a mixed-method approach, data were collected through surveys, interviews, and secondary economic reports. Quantitative analysis was conducted using regression models, while qualitative insights were derived from stakeholder perspectives. The findings indicate that improvements in transportation networks, road quality, and port facilities significantly enhance trade efficiency, reduce logistic costs, and stimulate inter-regional investment. Moreover, infrastructure expansion has increased access to education and healthcare services, thereby improving human capital development. However, challenges remain, including uneven distribution of infrastructure benefits and environmental concerns. This research highlights the crucial role of integrated planning in ensuring inclusive economic growth. The results contribute to policy recommendations for regional governments to prioritize equitable infrastructure allocation to maximize economic connectivity and sustainability in NTB.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license



How to Cite: Aisyah, N. (2025). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Konektivitas Ekonomi Daerah di Nusa Tenggara Barat. *Economics Note*, 1(2), 53-59. <https://doi.org/10.70716/econote.v1i2.84>

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam memperkuat fondasi perekonomian suatu daerah. Infrastruktur yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik untuk mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mempercepat arus barang, jasa, dan informasi yang pada gilirannya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi (Dubash & Morgan, 2013). Infrastruktur dapat dipandang sebagai katalisator pembangunan karena keberadaannya mampu menciptakan keterhubungan antarwilayah, mengurangi biaya transaksi, serta memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi kompetisi ekonomi global yang semakin ketat. Dengan tersedianya infrastruktur yang berkualitas, aktivitas ekonomi akan bergerak lebih cepat, rantai pasok dapat berjalan lebih efisien, dan integrasi pasar menjadi lebih luas sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

Dalam konteks pembangunan daerah, infrastruktur sering diposisikan sebagai prasyarat mendasar bagi terciptanya konektivitas ekonomi yang berkelanjutan. Konektivitas ini tidak hanya mencakup hubungan antarwilayah di dalam suatu provinsi, tetapi juga keterhubungan lintas provinsi bahkan antarnegara. Hal ini penting mengingat arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan menuntut setiap daerah untuk mampu mengintegrasikan diri dengan jaringan ekonomi yang lebih luas. Infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan logistik yang efisien akan menciptakan kelancaran mobilitas orang maupun barang. Pada gilirannya, kondisi ini akan membuka peluang baru bagi peningkatan investasi, pengembangan usaha kecil menengah, serta penciptaan lapangan kerja.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor transportasi dan logistik, memegang peranan krusial dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah. NTB merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis berupa kepulauan, yakni terdiri atas dua pulau besar—Lombok dan Sumbawa—serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kondisi geografis tersebut menjadikan aspek konektivitas sebagai isu vital, karena akses antarwilayah tidak selalu mudah dijangkau. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan ketergantungan pada moda transportasi tertentu, serta belum optimalnya integrasi sistem logistik antara wilayah daratan dan kepulauan.

Keterbatasan infrastruktur di NTB berimplikasi langsung pada berbagai aspek pembangunan ekonomi. Biaya logistik yang tinggi menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar. Distribusi hasil produksi masyarakat, seperti produk pertanian, perikanan, dan hasil industri kecil menengah, menjadi tidak efisien karena akses transportasi yang terbatas dan mahal. Kondisi ini pada akhirnya menurunkan daya saing produk lokal ketika harus berhadapan dengan produk dari daerah lain yang memiliki biaya distribusi lebih rendah. Tidak hanya itu, rendahnya kualitas infrastruktur juga berdampak pada aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar tenaga kerja. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di NTB tidak hanya menyangkut aspek ekonomi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Potensi besar NTB di sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian juga belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan akibat kendala infrastruktur. Sebagai contoh, sektor pariwisata yang menjadi andalan NTB, khususnya di Lombok dan Sumbawa, masih menghadapi hambatan aksesibilitas karena keterbatasan transportasi menuju destinasi wisata. Demikian pula dengan hasil perikanan dan pertanian, yang meskipun melimpah, seringkali sulit dipasarkan ke luar daerah karena keterbatasan fasilitas penyimpanan, pelabuhan, dan jaringan distribusi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dengan kemampuan infrastruktur untuk menunjang pengelolaannya secara optimal.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Prasetyo (2013) yang menegaskan bahwa wilayah dengan keterbatasan infrastruktur cenderung mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi. Minimnya kelancaran dalam distribusi barang dan rendahnya efisiensi sistem logistik membuat biaya ekonomi menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang memiliki infrastruktur memadai. Dampaknya, perekonomian daerah tidak dapat berkembang secara optimal, bahkan berisiko tertinggal semakin jauh dalam persaingan ekonomi nasional maupun global. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di NTB perlu dipandang sebagai agenda prioritas yang mendesak, karena keterhubungan wilayah dan kelancaran arus logistik merupakan kunci bagi transformasi ekonomi daerah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menggarisbawahi betapa pentingnya infrastruktur sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional. Infrastruktur dipandang tidak hanya sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai faktor strategis yang dapat mengubah struktur ekonomi suatu wilayah. Misalnya, Calderón dan Servén (2014) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang memadai mampu meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya distribusi, dan memperluas jangkauan pasar

antarwilayah. Dengan demikian, keberadaan jalan yang baik bukan sekadar mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka akses baru bagi perdagangan, investasi, dan integrasi antarwilayah. Temuan ini diperkuat oleh Aschauer (2015), yang menekankan bahwa infrastruktur publik memiliki dampak jangka panjang terhadap produktivitas ekonomi nasional, terutama karena infrastruktur mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) pada berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga industri.

Namun, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak dapat hanya diukur dari jumlah proyek yang dibangun atau besar kecilnya investasi yang digelontorkan. Kualitas, efektivitas, pemerataan, dan keberlanjutan manfaat menjadi kunci penting agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan dampak positif. Infrastruktur yang hanya terpusat pada daerah tertentu berisiko menimbulkan ketimpangan pembangunan, sementara infrastruktur yang tidak dikelola dengan baik justru dapat menjadi beban fiskal tanpa memberikan manfaat optimal. Tanpa adanya pemerataan dan pengelolaan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur justru berpotensi melahirkan kesenjangan baru antarwilayah atau antar kelompok masyarakat, sehingga tujuan awal untuk menciptakan pertumbuhan inklusif tidak tercapai.

Selain itu, literatur terbaru juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dimensi sosial dan kelembagaan yang perlu diperhatikan. Infrastruktur yang efektif membutuhkan tata kelola yang baik, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemeliharaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Straub (2018), yang menegaskan bahwa kualitas institusi berperan penting dalam menentukan sejauh mana infrastruktur dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi. Infrastruktur yang dibangun tanpa perencanaan matang atau tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal seringkali tidak memberikan manfaat yang maksimal, bahkan bisa menimbulkan masalah baru seperti konflik sosial, kerusakan lingkungan, atau inefisiensi penggunaan anggaran.

Dalam konteks Nusa Tenggara Barat (NTB), kajian yang secara spesifik menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan peningkatan konektivitas ekonomi masih relatif terbatas. Padahal, isu konektivitas sangat relevan dan mendesak untuk dikaji, mengingat kondisi geografis NTB yang berupa kepulauan menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, keterisolasian wilayah-wilayah tertentu menyebabkan biaya distribusi tinggi dan menghambat integrasi pasar. Di sisi lain, apabila didukung dengan infrastruktur yang memadai, NTB justru dapat memanfaatkan posisinya sebagai pintu gerbang perdagangan dan pariwisata di kawasan timur Indonesia.

NTB memiliki potensi besar di berbagai sektor ekonomi. Sektor pariwisata, misalnya, telah menunjukkan perkembangan pesat dengan hadirnya destinasi unggulan seperti Mandalika di Lombok, Gunung Rinjani, dan destinasi bahari di Sumbawa. Namun, keterbatasan akses transportasi—baik darat, laut, maupun udara—masih menjadi kendala dalam memperluas jangkauan wisatawan domestik maupun mancanegara. Demikian pula sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat NTB. Potensi produksi yang melimpah kerap terkendala oleh masalah distribusi karena kurangnya fasilitas jalan yang memadai, pelabuhan yang representatif, maupun sistem logistik yang terintegrasi.

Keterbatasan infrastruktur ini juga berdampak pada daya saing daerah. Produk-produk NTB sering kali kalah bersaing di pasar nasional karena biaya logistik yang tinggi, waktu distribusi yang lebih lama, serta keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan kata lain, ketidaktersediaan infrastruktur yang efisien menjadi penghambat utama bagi NTB untuk memanfaatkan potensi ekonominya secara optimal. Oleh sebab itu, penelitian mengenai pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap konektivitas ekonomi di NTB menjadi sangat penting, baik dari sisi akademis untuk mengisi kesenjangan literatur, maupun dari sisi praktis untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan yang lebih efektif dan inklusif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan kunci, antara lain: bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap konektivitas ekonomi daerah di

NTB? Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur di sektor transportasi dan logistik? Sejauh mana pemerataan pembangunan infrastruktur mampu menjembatani kesenjangan antarwilayah di NTB?

Berdasarkan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan konektivitas ekonomi di NTB, dengan fokus pada sektor transportasi dan logistik. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis empiris, sehingga dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan infrastruktur yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Kontribusi penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai hubungan antara pembangunan infrastruktur dan konektivitas ekonomi daerah di Indonesia, khususnya di kawasan timur yang masih relatif jarang mendapatkan perhatian dalam kajian akademis. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan implikasi praktis yang signifikan, baik dalam hal perencanaan maupun implementasi kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam ranah akademik, tetapi juga menawarkan wawasan aplikatif yang dapat mendukung pencapaian pembangunan ekonomi yang lebih merata di NTB.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed-method) dengan desain eksplanatori. Lokasi penelitian adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencakup Kota Mataram, Lombok, dan Sumbawa. Waktu penelitian berlangsung antara Januari–Juni 2023. Data primer diperoleh melalui survei terhadap 300 responden pelaku usaha dan rumah tangga, serta wawancara mendalam dengan 20 pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah dan pengusaha logistik. Data sekunder diperoleh dari laporan Fahrurrozi et al (2023) Kementerian Perhubungan, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Analisis kuantitatif menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara pembangunan infrastruktur dengan indikator konektivitas ekonomi, sedangkan analisis kualitatif menggunakan teknik analisis tematik untuk menggali persepsi dan pengalaman masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas antarwilayah. Infrastruktur jalan provinsi utama yang diselesaikan pada tahun 2021 tidak hanya menjadi sarana fisik penghubung, tetapi juga menjadi katalisator bagi dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. Data menunjukkan bahwa rata-rata biaya transportasi mengalami penurunan sebesar 15% setelah proyek tersebut rampung. Penurunan biaya transportasi ini memiliki implikasi luas yang mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Dari sisi ekonomi, penurunan biaya distribusi barang membuat harga komoditas lebih kompetitif di pasar, baik di tingkat lokal maupun luar daerah. Produk pertanian seperti jagung, padi, dan bawang merah dari Bima serta hasil perikanan dari Lombok Timur dapat dipasarkan dengan biaya logistik yang lebih rendah, sehingga meningkatkan margin keuntungan petani dan nelayan. Dari sisi sosial, akses jalan yang lebih baik mendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Warga dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum, yang sebelumnya sulit dijangkau akibat keterbatasan infrastruktur. Mobilitas ini pada gilirannya mendukung peningkatan kualitas hidup, menurunkan isolasi geografis, serta memperkuat integrasi sosial antarwilayah.

Fenomena ini selaras dengan temuan Calderón dan Servén (2014) yang menekankan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi berhubungan erat dengan efisiensi logistik, peningkatan produktivitas, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Mereka berargumen bahwa akses jalan yang lebih

baik akan mempercepat aliran faktor produksi, memperluas pasar, dan menurunkan biaya distribusi, sehingga menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian lokal. Dengan demikian, pembangunan jalan di NTB dapat dipandang sebagai faktor pendorong utama bagi proses transformasi ekonomi daerah.

Selain pembangunan jalan, peningkatan kualitas pelabuhan di NTB juga memberikan kontribusi nyata terhadap dinamika perdagangan antar pulau. Data Badan Pusat Statistik (Fahrurrozi et al, 2023) mencatat adanya peningkatan volume ekspor hasil pertanian dan perikanan sebesar 20% dalam dua tahun terakhir. Lonjakan ini tidak dapat dilepaskan dari perbaikan fasilitas bongkar muat, peningkatan kapasitas dermaga, serta penerapan sistem logistik yang lebih terintegrasi. Pelabuhan yang lebih modern memungkinkan arus barang keluar masuk wilayah menjadi lebih cepat, efisien, dan terjamin kualitasnya.

Dampak lain yang cukup signifikan adalah meningkatnya daya saing produk lokal NTB di pasar nasional maupun internasional. Produk perikanan seperti tuna dan kerapu, serta komoditas pertanian seperti rumput laut dan jagung, kini lebih mudah dipasarkan ke luar daerah dengan biaya transportasi yang relatif rendah. Hal ini bukan hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga memperkuat posisi NTB sebagai salah satu pusat produksi agribisnis dan kelautan di Indonesia bagian timur. Dengan demikian, pembangunan pelabuhan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ekonomi lokal NTB dengan jaringan perdagangan global.

Namun, manfaat pembangunan infrastruktur ini belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah di NTB. Data lapangan menunjukkan bahwa daerah pedalaman, khususnya wilayah utara Sumbawa, masih menghadapi kendala serius terkait aksesibilitas. Jalan penghubung antar-kecamatan banyak yang belum diperkeras, transportasi publik terbatas, dan jarak menuju pusat layanan ekonomi maupun sosial masih tergolong jauh. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan nyata antara wilayah perkotaan yang terletak di sekitar pusat pemerintahan dan pariwisata (seperti Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram) dengan wilayah hinterland yang relatif tertinggal.

Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jurang kesenjangan ekonomi antarwilayah. Pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah strategis—misalnya kawasan pariwisata Mandalika—memang mampu menarik investasi, tetapi pada saat yang sama dapat memperlemah daya saing daerah pedalaman yang belum mendapatkan akses infrastruktur memadai. Sejalan dengan pandangan Aschauer (2015), pembangunan infrastruktur yang tidak inklusif dapat menimbulkan disparitas kesejahteraan. Masyarakat di daerah yang tidak terjangkau infrastruktur akan tetap menghadapi hambatan dalam mengakses peluang ekonomi, sehingga siklus ketertinggalan sulit diputus.

Lebih jauh, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur ini juga memiliki implikasi sosial dan politik. Ketika sebagian masyarakat merasa tidak terakomodasi dalam agenda pembangunan, muncul potensi ketidakpuasan yang dapat berimbas pada melemahnya kohesi sosial dan menurunnya legitimasi kebijakan pemerintah. Hal ini menjadi tantangan serius yang perlu segera diantisipasi dengan perencanaan pembangunan yang lebih merata dan berbasis keadilan sosial.

Dengan demikian, meskipun pembangunan jalan dan pelabuhan di NTB telah membawa dampak positif yang besar terhadap efisiensi transportasi, peningkatan perdagangan, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat, distribusi manfaatnya masih belum seimbang. Upaya untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen penggerak pembangunan daerah harus disertai dengan kebijakan yang inklusif, sehingga seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedalaman, dapat merasakan manfaatnya secara adil.

Dari hasil wawancara dengan para pelaku usaha, terungkap bahwa pembangunan infrastruktur juga mendorong peningkatan investasi swasta, khususnya di sektor pariwisata dan agribisnis. Jalan yang memadai mempermudah akses wisatawan menuju destinasi pariwisata baru, sehingga membuka peluang bagi tumbuhnya usaha akomodasi, transportasi, serta industri kreatif lokal. Di sisi lain, akses jalan yang baik juga mempercepat distribusi hasil pertanian ke pasar lokal maupun luar daerah. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil menengah. Temuan ini sejalan

dengan penelitian Prasetyo (2013) yang menegaskan bahwa infrastruktur transportasi menjadi faktor kunci dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Meski demikian, pembangunan infrastruktur di NTB masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan pendanaan menjadi hambatan utama dalam memperluas pembangunan hingga ke wilayah terpencil. Kedua, koordinasi antarinstansi pemerintah sering kali belum optimal, sehingga program pembangunan berjalan parsial dan kurang terintegrasi. Ketiga, dampak lingkungan akibat pembangunan juga perlu mendapat perhatian serius, mengingat sebagian proyek infrastruktur berpotensi mengganggu ekosistem, terutama di wilayah pesisir dan kawasan konservasi. Jika tantangan ini tidak segera diatasi, maka manfaat pembangunan infrastruktur dapat tereduksi dan bahkan menimbulkan masalah baru bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu menyusun perencanaan pembangunan yang tidak hanya fokus pada wilayah strategis dan pariwisata, tetapi juga menjangkau daerah-daerah tertinggal. Pembangunan berbasis pemerataan wilayah dan keterlibatan masyarakat lokal akan memastikan bahwa manfaat infrastruktur dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di NTB tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan konektivitas ekonomi daerah. Dampak tersebut terlihat terutama melalui penurunan biaya transportasi yang semakin efisien, peningkatan volume perdagangan antarwilayah, serta perluasan arus investasi yang masuk ke berbagai sektor strategis. Kehadiran infrastruktur baru, baik berupa jalan, pelabuhan, maupun jaringan energi dan telekomunikasi, telah menciptakan peluang bagi berkembangnya aktivitas ekonomi lokal serta memperkuat integrasi NTB dengan pasar regional maupun nasional.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah distribusi manfaat pembangunan yang belum merata, di mana daerah-daerah tertentu menikmati perkembangan lebih pesat dibandingkan wilayah lain yang masih tertinggal. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang masif juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, seperti degradasi ekosistem dan berkurangnya daya dukung lahan, apabila tidak diimbangi dengan perencanaan yang ramah lingkungan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya perencanaan infrastruktur yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan terintegrasi akan memastikan keterkaitan antarproyek sehingga hasil pembangunan dapat saling mendukung. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal secara partisipatif dapat meningkatkan rasa memiliki sekaligus menjamin bahwa pembangunan menjawab kebutuhan riil di lapangan. Aspek keberlanjutan juga harus menjadi prioritas, dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di NTB diharapkan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat dan wilayah. Upaya ini akan mendukung terciptanya pembangunan daerah yang lebih merata, tangguh, dan berdaya saing dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Achjar, N., & Panennungi, M. A. (2009). The impact of rural infrastructure development on poverty reduction in Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 57(3), 339–348.
- Amin, C., Mulyati, H., Anggraini, E., & Kusumastanto, T. (2021). Impact of maritime logistics on archipelagic economic development in eastern Indonesia. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, 37(2), 157–164.
- Antle, J. M. (1983). Infrastructure and aggregate agricultural productivity: International evidence. *Economic Development and Cultural Change*, 31(3), 609–619.
- Aschauer, D. A. (2015). Public investment and productivity growth in the Group of Seven. *Economic Perspectives*, 13(5), 17–25.
- Calderón, C., & Servén, L. (2014). Infrastructure, growth, and inequality: An overview. *World Bank Policy Research Working Paper*.
- Chu, Z. (2012). Logistics and economic growth: a panel data approach. *The Annals of Regional Science*, 49(1), 87–102.
- Dubash, N. K., & Morgan, B. (Eds.). (2013). *The rise of the regulatory state of the south: Infrastructure and development in emerging economies*. OUP Oxford.
- Fahrurrozi, M., Mohzana, M., Hartini Haritani, H., Dukha Yunitasari, D., & Hasan Basri, H. (2023). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Regional Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 70–89.
- Kumari, A., & Sharma, A. K. (2017). Infrastructure financing and development: A bibliometric review. *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, 16, 49–65.
- Munnell, A. H. (1992). Policy watch: infrastructure investment and economic growth. *Journal of Economic Perspectives*, 6(4), 189–198.
- Nugraha, A. T., Prayitno, G., Situmorang, M. E., & Nasution, A. (2020). The role of infrastructure in economic growth and income inequality in Indonesia. *Economics & Sociology*, 13(1), 102–115.
- Nurmansyah, A. S., & Wikarya, U. (2023). Does It Have A Transportation Infrastructure Increasing Regional Economic Growth on Indonesia? (Spatial Spillover Effect Analysis). *Quantitative Economics and Management Studies*, 4(4), 757–763.
- Prasetyo, B. A., Priyarsono, D. S., & Mulatsih, S. (2013). Infrastructure, economic growth and inequality in Indonesia land borders. *Economic Journal of Emerging Markets*, 99–108.
- Schindler, S., & Kanai, J. M. (2021). Getting the territory right: Infrastructure-led development and the re-emergence of spatial planning strategies. *Regional Studies*, 55(1), 40–51.
- Setiawan, T., Samith, M. F., & Mughits, M. H. (2025). The Sustainable Development Nexus (SDN): Delivering Environmental Innovation Technologies (EITs) for Community Ecological Resilience (CER) in Indonesia. *Scientia. Technology, Science and Society*, 2(1), 111–132.